



► BANTUAN SOSIAL

Dinsos Data Ulang Peserta KSPJS

UMBULHARJO—Dinas Sosial Kota Jogja akan mendata ulang Keluarga Sasaran Perlindungan Jaminan Sosial (KSPJS) 2019. Pendaftaran akan dimulai pertengahan Juli tahun ini.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Kepala Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Jogja Esti Setiyarsi menjelaskan parameter pendataan yang digunakan diperbarui dan disingkirkan dengan Basis Data Terpadu (BDT).
 "Ada beberapa revisi parameter yang digunakan. Misalnya, cakupan kesehatan, luas bangunan tempat tinggal, rata-rata penghasilan yang disesuaikan garis kemiskinan dari

► Beberapa parameter yang direvisi antara lain cakupan kesehatan, luas bangunan tempat tinggal, serta rata-rata penghasilan yang disesuaikan garis kemiskinan dari BPS.

► Dinsos Kota Jogja menargetkan hasil pendataan bisa diuji publik pada minggu pertama dan kedua November mendatang.

bisa masuk dalam BDT.
 "Kalau masuk sasaran BDT, maka berbagai program perlindungan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat bisa juga dinikmati pemegang KSPJS," katanya.

Sekadar diketahui, jumlah KSPJS berdasarkan pendataan tahun lalu sebanyak 17.253 KK. Seluruh pemegang KMS tersebut selama ini menerima program bantuan yang digulirkan Pemkot. Seluruhnya akan menjadi sasaran pendataan tahun ini. Selama proses pendataan, Dinsos akan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
 "Selain 17.253 KK tersebut, kami juga akan mendata 7.488 KK tambahan hasil usulan baru," ujar Esti.

Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial Kota Jogja Supriyanto menambahkan pendataan akan dilakukan selama dua bulan. Mulai 16 Juli hingga 14

TUGAS DAN WEWENANG PEMKAB/PEMKOT TERKAIT PENANGANAN KEMISKINAN

<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional. 2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota. 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota. 5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan masyarakat miskin. 6. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan masyarakat miskin. <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Ditulah dari berbagai sumber</p>
--	--

September tahun ini. Ditargetkan, hasil pendataan bisa diuji publik pada minggu pertama dan kedua November mendatang.
 Sebelum didata Dinsos akan menyosialisasikan terlebih dulu pada TKSK sembari mencetak formulir pendataan. "Ini kami mulai pekan pertama pada Juli mendatang," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005